

REVITALISASI ASAS ETIS PEMERINTAHAN SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN DAN KEKERASAN STRUKTURAL

Fadhilah

Abstract

This article is a study of literature, entitled ethical management principles for combating crime and structural violence revitalization efforts. Material object of this research is ethical principles and formal object is the Ethical Governance. The scope of discussion in this study is the importance of the relevance of ethical principles in the organization to the government's efforts to combat crime and violence that occurred in Indonesia in recent structural. The purpose of this research is to restore the importance of moral values contained in the Code of Ethical Principles as social control to the b The method used in this study is a description and analysis of philosophical reflection. ureaucrats in the fight against crime and structural violence. The goal of this research is to see how far the relevance of moral values which become the handle of the bureaucrats in government relations for the fight against crime and structural violence.

Results of this study is that the principle of ethical management remains an important role in managing the behaviour of officials to prevent violations of the public relations efforts to eliminate crime and structural violence.

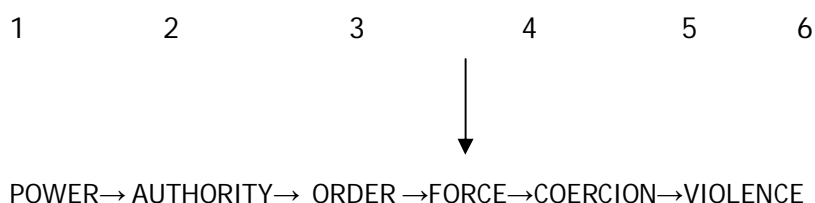
Keywords : *Revitalization of the ethical principles of ethical governance and structural violence crimes*

Pendahuluan

Pemerintahan dapat dikatakan sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat masyarakat sebagai anggotanya. Setiap organisasi memiliki elemen-elemen yang merupakan sumber bagi kekuatannya.

Organisasi yang solid memiliki prinsip dan tujuan yang menjadi landasan bagi keberadaannya.

Pemerintahan dalam perspektif lain juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Apter dalam Taliziduhu Ndraha (2003, hal 321), berpendapat bahwa dari sudut pandang pemerintah, pemerintahan menyentuh hubungan pemerintahan, tatkala power digunakan (*exercising power*) oleh pemerintah. Hubungan tersebut dari sudut pemerintah dapat digambarkan dalam skema berikut:



PEMERINTAH HUBUNGAN PEMERINTAHAN YANG DIPERINTAH

Sentuhan terletak pada titik 3 gambar di atas, yaitu ketika perintah pemerintah tidak berjalan sebagaimana diharapkan oleh pemerintah, atau pada saat pemerintah hendak mencapai tujuan tertentu dengan jalan apapun (tujuan menghalalkan segala cara). Pada titik 1 dan 2 yang menjadi pertimbangan utama adalah: politik, hukum, dan administratif. Pada titik 3 ada 2 kemungkinan: 1) pemerintah stop sebentar, lalu bertanya, melakukan penelitian/penyelidikan, mengevaluasi keadaan atau melakukan review dan 2) langsung menggunakan *force* dan seterusnya dengan segala konsekuensinya. Pada alternatif ke 1) itulah pentingnya pertimbangan etik melalui diri pejabat yang berkompeten mengambil keputusan jauh lebih besar dari pada pada alternatif ke 2) (Taliziduhu Ndraha, 2003, hal 321).

Permasalahan

Hubungan pemerintahan dapat berjalan secara harmonis dan seimbang jika dilandasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam asas-asas etis, namun jika yang terjadi sebaliknya, yaitu ketika asas-asas etis pemerintahan dan administrasi pemerintahan tidak lagi menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka apa yang disebut sebagai **kejahatan dan kekerasan struktural** akan menjadi *output* atas hubungan pemerintahan tersebut.

Ruang Lingkup Pembahasan

Sebuah organisasi pemerintahan dianalogkan sebagai gerak roda suatu benda yang berporos pada sumbunya. Untuk dapat berjalan atau bergerak, sebuah organisasi diperlukan manajemen. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“doing right things”) secara *efficient* (“doing things right”) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen meliputi:

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha, termasuk penetapan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak, penggerakan/penggunaan sumber-sumber supaya *output* dan *outcome* yang dihasilkan/dinikmati konsumen sesuai dengan *output /outcome* yang diharapkan.
3. Siklus produk yang berawal dari consumer, dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada consumer. (Taliziduhu Ndraha, 2003, hal 159).

Berdasarkan 3 unsur yang terdapat dalam manajemen tersebut, maka setiap gerak organisasi dalam aktivitasnya harus selalu fokus pada tujuan awal yang telah ditetapkan agar dapat mencapai hasil maksimal sesuai dengan fungsi organisasi tersebut. Secara siklus organisasi berawal dari *consumer* dan berakhir pula pada *consumer*. Demikian pula halnya dengan manajemen pemerintahan sebagai organisasi masyarakat yang di dalamnya juga terdapat 3 elemen utama tersebut sebagai sumber kekuatannya. Tujuan awal berdirinya suatu Negara harus senantiasa menjadi fokus utama setiap gerak dan aktivitasnya. Begitupun dengan fungsinya melalui perencanaan usaha sesuai dengan output/outcome yang telah ditetapkan dalam setiap tahap pembangunan Negara, baik jangka pendek, maupun jangka panjang. Manajemen pemerintahan Indonesia dalam siklusnya harus berawal dari usaha mewujudkan aspirasi rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat pula, sesuai dengan prinsip demokrasi politik, maupun demokrasi ekonomi. Untuk itulah, maka manajemen pemerintahan harus senantiasa dalam kontrol/kendali yang

ketat/disiplin oleh lembaga resmi Negara, maupun kontrol dari masyarakat terhadap perilaku aparturnya. Di sinilah **Asas Etis Pemerintahan menjadi penting** sebagai alat kontrol terhadap gerak organisasi/manajemen pemerintahan melalui perilaku birokrasi aparatur Negara dan sikap mental pemerintah dalam "*political-will*"-nya untuk mewujudkan prinsip /Asas "*good governance*", sehingga berhasil untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagaimana tekad pemerintahan reformasi.

Sesuai dengan fungsinya, manajemen pemerintahan meliputi berbagai aspek, sebagaimana "Definisi Manajemen Pemerintahan" sebagai unit kerja Menurut Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan yang dibentuk oleh Badan Diklat Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut:

1. Asas dan Sistem Pemerintahan.
2. Hukum Tata Pemerintahan.
3. Ekologi Pemerintahan.
4. Filsafat dan Etika Pemerintahan.
5. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan.
6. Kepemimpinan Pemerintahan.
7. Reformasi Pembangunan Daerah.

(Taliziduhu Ndraha, 2003, hal 158).

Semua unsur tersebut merupakan elemen-elemen penting untuk tetap kokoh berdirinya suatu bangunan Negara, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat. Terkait dengan unsur yang pertama, yaitu asas dan sistem pemerintahan, berikut ini terdapat beberapa Asas pemerintahan menurut beberapa pendapat, antara lain:

a. T. Ndraha:

1. Aktif
2. Mengisi yang kosong
3. Membimbing
4. Freies Ermessen
5. Dengan Sendirinya
6. Historik
7. Etik

b. M. Hamdi:

1. Aktif
2. Freies Ermessen
3. Otomatik
4. Historik
5. Etik
6. Sentralisasi
7. Desentralisasi
8. Dekonsentrasi
9. Vrij Bestuur
10. Tugas Pembantuan
11. Detournement de Pouvoir (sic!)

- c. **Koswara**, membedakan asas pemerintahan menjadi beberapa kelompok, yaitu asas kepatuhan, asas pemerintahan yang baik dan asas Pancasila, asas Penyelenggaraan:

Asas kepatuhan meliputi:

1. Perlakuan yang korek
2. Penelitian yang seksama
3. Prosedur keputusan yang saksama
4. Keputusan yang Baik dan Bijak
5. Motivering yang jelas, Argumentasi yang kuat
6. Persamaan dan Kesamaan
7. Keterpercayaan
8. Pertimbangan yang masuk akal dan Adil
9. Penyalahgunaan wewenang (sic!)
10. Fair Play

Asas Pemerintahan yang Baik:

1. Kepastian hukum
2. Keseimbangan
3. Equality
4. Bertindak cermat
5. Motivasi
6. Non misus of competence
7. Fair Play
8. Reasonableness
9. Meeting Raised (sec!) Expectation
10. Undoing the Consequenses of an Unnulled (sic!)
11. Protecting the Personal Way of Life
12. Kebijaksanaan (Sapientia)
13. Public Service

Asas Pancasila:

1. Berwibawa
2. Jujur dan seterusnya

Asas Penyelenggaraan Negara:

1. Dekonsentrasi dan seterusnya.

(Taliziduhu Ndraha, 2003, hal . 682)

Dari sekian banyak asas pemerintahan tersebut di atas, asas etis pemerintahan menjadi penting untuk mencegah kekerasan struktural lebih jauh sebagai akibat dari kejahatan struktural yang sudah terlembagakan. Asas etis pemerintahan menjadi dasar pertimbangan moral bagi pejabat yang berkompeten mengambil keputusan dalam bertindak. Hal ini untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan pemerintahan tersebut. Dengan kata lain asas etis pemerintahan adalah merupakan persoalan prinsip yang tak bisa diabaikan, karena merupakan landasan nilai (moral) yang menggerakkan proses hubungan tersebut.

Selain asas pemerintahan, terdapat pula **asas etis administrasi pemerintahan** sebagaimana pendapat The Liang Gie (1994) antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (*responsibility*); yaitu asas etis yang menyangkut hasrat seorang petugas untuk merasa memikul kewajiban secara penuh dalam pelaksanaan tugas pekerjaan secara maksimal. Pertanggungjawaban meliputi 3 hal, yaitu:
 - a) Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas , baik eksplisit, maupun implisit. Pertanggungjawaban eksplisit menyangkut tentang cara pelaksanaan tugas kedinasan. Sedangkan akuntabilitas implicit menyangkut pengaruh/efek dari pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.
 - b) Pertanggungjawaban sebagai kausalitas/ sebab-akibat, baik eksplisit, maupun implicit. Secara eksplisit dalam hal ini meliputi: sumber, pengetahuan, pilihan/alternative, maksud pelaksanaan tugas. Secara implisit menyangkut landasan etis pelaksanaan tugas, misalnya: kebajikan.
 - c) Pertanggungjawaban sebagai kewajiban: yaitu pertanggungjawaban seorang aparatur pemerintahan dalam kapasitasnya sesuai dengan posisinya. Dalam hal ini mereka bertanggungjawab terhadap yang memberi delegasi/perintah/wewenang.

Asas pertanggungjawaban tersebut menjadi indikator moral utama bagi pemerintah dalam seluruh tugas yang diembannya.
2. Pengabdian (*dedication*); yaitu asas etis yang berhubungan dengan asas pertanggungjawaban, namun dalam hal ini lebih menekankan motivasi, karena menyangkut semangat dan niat yang tulus (tanpa pamrih) sesuai dengan tugas dan profesinya. Asas pengabdian juga berkaitan dengan asas kesetiaan, yaitu kesetiaan kepada Negara, baik bagi rakyat maupun pemerintah.
3. Kesetiaan (*loyalty*); yaitu asas yang mengandung kebajikan moral berupa ketulusan untuk mematuhi peraturan dan perundangan demi tercapainya tujuan bangsa dan Negara yang mengacu pada mono loyalitas. Kesetiaan pemerintah terhadap rakyat adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga amanah yang dibebankan kepadanya

untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

4. Kepekaan (*sensitivity*); yaitu asas etis yang mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk siaga dan tanggap terhadap kemungkinan berbagai perkembangan dan perubahan situasi, kondisi, serta kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Asas ini bagi aparatur pemerintah sangat penting untuk dapat mencegah timbulnya berbagai kemungkinan protes, pembangkangan dan pemberontakan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan rakyat terhadap pemerintah. Hal ini menyangkut hubungan pemerintahan, yaitu antara rakyat sebagai pihak yang diperintah dengan pemerintah sebagai pihak yang memberi perintah.
5. Persamaan (*equality*); yaitu asas etis yang mengandung nilai moral keadilan. Bagi aparatur pemerintah Asas ini berupa perlakuan yang adil dalam memberikan pelayanan kepada publik, tanpa membedakan status sosial, hubungan kerabat dan kepentingan-kepentingan pribadi. Asas ini penting untuk mencegah/memberantas semua bentuk KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral keadilan.
6. Kepantasan (*equity*); yaitu merupakan perimbangan asas persamaan (*equality*). Asas ini mencakup nilai keadilan dalam arti luas. Bagi pemerintah hal ini menyangkut hak dan kewajiban. Dari sisi kewajiban, hal ini berkaitan dengan pelayanan yang pantas bagi aparatur pemerintah terhadap publik sesuai dengan situasi dan kondisi. Dari sisi hak, hal ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah sebagai reward atas tugas dan pengabdianya. Begitu juga dengan punishment bagi aparatur pemerintah yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Berbagai asas etis pemerintahan di atas secara konseptual menjadi pilar bagi kokohnya sebuah organisasi pemerintahan. Namun fakta yang terjadi di lapangan nilai-nilai tersebut tidak selalu menjadi acuan para birokrat dalam menjalankan tugasnya, sehingga secara politis terjadilah apa yang disebut kejahatan dan kekerasan struktural. Kejahatan yang menjadi akibat langsung politik kekuasaan adalah kejahatan struktural. Pemahaman kejahatan struktural tidak bisa dipisahkan dari tindakan

moral. Kejahatan dalam pembahasan etika individual biasanya dikaitkan dengan keputusan/tindakan seseorang. Kejahatan dalam hal ini dilawankan dengan keutamaan. Kejahatan atau keutamaan ditentukan oleh 3 dimensi tindakan manusia. Dimensi **pertama** terkait dengan diri **subyek pelaku, yaitu masalah kehendak baik/jahat, masalah kebebasan dan masalah pengetahuan**. Tindakan manusia dapat dipertanggungjawabkan secara moral apabila dilakukan secara sadar dikehendaki dan secara bebas dilakukan. Kehendak adalah apa yang menjadi obyek dari tindakan manusia. Dimensi **kedua** adalah masalah **konteks atau situasi**, yaitu masalah **tempat, waktu**, termasuk **konteks komunitas**, dalam hal ini tindakan dilihat dari 3 dimensi waktu, yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Tindakan yang dilakukan masa lalu tetap harus dipertanggungjawabkan, meskipun saat ini pelaku tidak menghendakinya lagi. Dimensi **ketiga** adalah masalah **tujuan, hasil, resiko atau konsekuensi**. Persoalan kejahatan tindakan manusia menjadi berdampak luas ketika hal tersebut dilakukan bukan sebagai hasil tindakan perseorangan, tetapi adanya eksterioritas kejahatan atau faktor luar diri manusia, seperti halnya **kejahatan struktural**. Dalam hal ini kejahatan struktural masuk dalam wilayah etika sosial. (Haryatmoko, 2003, hal 37-38). Kejahatan struktural sebagai hasil (output) dari hubungan pemerintahan atau sebagai akibat langsung dari politik kekuasaan dapat berdampak luas, sehingga menghasilkan **kekerasan struktural**. Dalam konteks ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk kebijakan dan perilaku pemerintah yang menyebabkan kebencian rakyat, balas dendam, demo, pemberontakan dan lain-lain. Politik ekonomi yang menghasilkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin dari perspektif pihak yang diperintah (rakyat) dapat dianggap sebagai kejahatan struktural, karena telah mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah. Dalam hal ini penderitaan rakyat, kemiskinan dan kesengsaraan hidup rakyat adalah hasil dari kejahatan struktural. **Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah bagaimana kejahatan struktural tersebut dapat dipahami dan disadari oleh pihak pemerintah, sehingga pemberantasannya dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif.**

Input proses pemerintahan dalam perspektif ilmu pemerintahan, bukanlah legalitas dan legitimasi, melainkan janji atau komitmen, baik pada Tuhan, diri sendiri, maupun pada masyarakat, yang dinyatakan oleh

yang bersangkutan berdasarkan kehendak bebasnya mengangkat sumpah dan membubuhkan tanda tangan pada naskah kontrak. Lembaga yang disebut pemerintah terbentuk berdasarkan komitmen yang dalam hal ini **pemerintahan adalah proses penepatan janji**. Legitimasi seorang pejabat diukur dengan fakta, sejauh mana ia menepati janji (instrument untuk mengukur hal ini harus dibuat pada saat janji dirumuskan) (Taliziduhu Ndraha, 2003, hal. 71). Dengan kata lain antara *input* proses pemerintahan dengan *output*-nya adalah merupakan konsekuensi logis yang tak bisa dihindarkan.

Jika kita tengok ke belakang, berbagai fakta sejarah pemerintahan Indonesia dimana kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia begitu tajam, banyaknya kasus pelanggaran HAM, serta berbagai gangguan stabilitas politik nasional adalah potret bagaimana wajah pemerintahan Indonesia selama ini. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang lebih layak dikategorikan sebagai kemiskinan struktural adalah output dari politik ekonomi Indonesia sebagai produk hubungan pemerintahan tersebut, terutama selama orde baru.

Tanpa bermaksud mendiskualifikasikan antara beberapa pemegang kekuasaan pemerintahan Indonesia, sejak orde lama hingga pemerintahan reformasi, rakyat Indonesia dapat merasakan dan menilai bagaimana moralitas pemerintah dalam tekadnya mewujudkan cita-cita nasional, yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tekad pemerintahan orde lama adalah bagaimana dapat mewujudkan tujuan pembangunan politik di Indonesia. Selama pemerintahan orde lama berlangsung, demokrasi politik memiliki ciri khas tersendiri yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun trauma sejarah dengan gerakan G 30 S/PKI 1965 telah menjadikan awal langkah target politik pemerintahan Orde Baru, yaitu pembangunan di bidang ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Namun fakta tak bisa dihindari, bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata menyisakan kesenjangan ekonomi rakyat yang begitu tajam dan mencapai puncaknya pada krisis ekonomi Indonesia tahun 1996-1998. Sejak itulah muncullah gerakan reformasi mahasiswa yang akhirnya melahirkan pemerintahan reformasi.

Gerakan reformasi mahasiswa yang berhasil melengserkan pemerintahan Orde Baru adalah salah satu bukti ketidakpuasan rakyat Indonesia dalam hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah yang telah menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia. Meskipun dalam perjalanannya pemerintahan reformasi terdapat banyak sisi kelemahan dan kekurangsiapan SDM Indonesia dalam memikul amanah dan tanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita nasional (masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945), namun dalam perspektif etika pemerintahan telah memperlihatkan arah kemana rakyat Indonesia hendak dibawa.

Berawal dari krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1996, pemerintahan reformasi Indonesia dimulai. Tekad baru pemerintahan reformasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan semangat memberantas segala bentuk tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dengan semangat itulah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah reformasi antara lain dengan dibentuknya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), meskipun belakangan justru lembaga tersebut ternoda oleh kasus "Antasari". Demikian juga dengan kasus "Gayus" terhadap korupsi pajak. Kedua kasus tersebut menurunkan (jika tidak menghilangkan) kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah dalam memegang amanah rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum lagi persoalan krisis di bidang hukum yang justru dipicu oleh penggantian hakim yang nota bene lebih dinilai bersih oleh rakyat, namun karena dianggap membahayakan kepentingan dan kewibawaan pemerintah akhirnya tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara adil dan benar.

Berbagai upaya pemerintah reformasi dalam menangani krisis di Indonesia telah ditempuh, antara lain melalui berbagai kebijakan politik ekonomi yaitu sebagai berikut:

- Stabilitas kurs Dollar dan aspek ekonomi politiknya
- Membuka peluang usaha bagi ekonomi menengah ke bawah
- Reformasi kelembagaan dan system ekonomi politik
- Pembenahan di bidang BUMN
- Independensi BII dan IMF

- Otonomi Daerah dan Demokrasi ekonomi
- Gerakan Kenaikan Gaji
- Upaya penyelesaian masalah tenaga kerja (Didik J. Rachbini, 2001)

Sejauh ini, ternyata upaya tersebut masih belum mencapai target maksimal yang diharapkan sebagaimana mestinya. Hal itu tidak lain disebabkan oleh berbagai faktor yang bersumbu pada persoalan moralitas aparatur/ pemerintah yang berkompeten menangani masalah tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Antasari, Bank Century, Gayus, dll. Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan serius, maka upaya pemberantasan kejahatan dan kekerasan struktural yang telah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia tidak akan berhasil. Dengan kata lain reformasi politik ekonomi, mau tidak mau mensyaratkan asas etis pemerintahan sebagai alat kontrol lembaga pemerintahan dan masyarakat terhadap manajemen pemerintahan di Indonesia, terutama di era reformasi ini. Hal ini juga perlu didukung dengan supremasi di bidang hukum untuk menjamin rasa keadilan dan kebenaran masih menjadi landasan reformasi di bidang hukum. Demikian pula perlunya dukungan sistem informasi dan komunikasi massa yang transparan, sehingga tidak ada rekayasa politik yang merupakan pembodohan rakyat atas kejahatan struktural yang telah terlembagakan, sehingga menyisakan duka panjang bagi rakyat karena harus menghadapi kekerasan struktural.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam Azas Etis Pemerintahan merupakan elemen penting yang harus menjadi landasan moral para birokrat dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut sebagai upaya pemberantasan kejahatan dan kekerasan struktural. Untuk itu Asas-asas Etis Pemerintahan seharusnya tidak hanya menjadi landasan konseptual secara formal, melainkan harus menjadi kontrol sosial yang berfungsi secara praktis.

Referensi

- Burhanudin Salam, 1997, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1997, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta.
- Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rachbini, Didik J., 2001, *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saefuddin, AM., 1998, *Reformasi Politik dan Ekonomi* (editor: Agus Wahid), cetakan pertama, Misaka Galiza, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid 1 dan 2)*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- The Liang Gie, 1994, *Etika administrasi Pemerintahan Negara, Modul UT*.